

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

_____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Budiono, Herlien, 2004, *Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak*, Renvoi Edisi Tahun I Nomor 10.

Ginting, Darwin, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Harsono, Boedi, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Cetakan Kedua, Universtitas Trisakti, Jakarta.

Jeddawi, Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. I, Total Media, Yogyakarta.

Marbun, S.F, dkk, 2001, *Hukum Administrasi Negara (Dimensi-Dimensi Pemikiran)*, Cet. 1, UII Press, Yogyakarta.

Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Edisi Revisi, Karya Media, Yogyakarta.

Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

N. Idroes, Ferry, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar Kesepakatan Basel II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta.

Siaahaan, Marihot Pahala, 2010, *Hukum Pajak Material (Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, edisi ke 2, Enresco, Bandung.
- Soemohamijaya, Soeparman, dalam Tunggal Anshari Setia Negara, 2017, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang.
- Suandi, Erly, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Subekti, R., 1998, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi

- Arfiani, Andi Novy, “Asas Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
- Perwitiningsih, “Penerapan Saat Terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dalam Transaksi Jual Beli Tanah Di Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.
- Suryani, Sapta Febrian Anugrah, “Implementasi Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan Dikaitkan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/atau Bangunan Di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 1.

Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.6 Tahun 2018 tertanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Indramayu.

Surat Edaran Bupati Indramayu Nomor 973/142.a/BKD tertanggal 1 Februari 2018 tentang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Indramayu.

Kode Etik PPAT sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Kode Etik PPAT Kongres V Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditetapkan di Bali pada tanggal 22-25 November 2010;

Kode Etik Notaris sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang ditetapkan di Banten pada tanggal 30 Mei 2015.